

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Reformasi tata kelola pemerintahan menjadi fenomena besar dan klasik pada akuntansi sektor publik. Hal ini terjadi disebabkan tuntutan reformasi yang membawa demokratisasi pengelolaan organisasi dengan mempertimbangkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini tuntutan tersebut lebih dikaitkan dengan bidang pengelolaan keuangan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi segala amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu: 1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. 2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawabn kepada masyarakat luas. Mardiasmo (2018:27). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan tuntutan masyarakat agar baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menjalankan sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara disebutkan bahawa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan informasi keuangan kedalam bentuk laporan keuangan untuk dalam satu periode kepada para pemangku kepentingan. Banyak pihak yang membutuhkan informasi dalam laporan keuangan yang di publikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu kualitas laporan keuangan yaitu

mudah dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan sangat di perlukan oleh pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas tidak lepas dari kompetensi yang di miliki sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan, sebab dalam penusunan laporan keuangan dibutuhkan pemahaman dalam proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang telah diatur. Kompetensi sumber daya manusia adalah pengetahuan, keteampilan dan sikap seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Dinas daerah sebagai organisasi pemerintah yang memerlukan sumber daya manusia yang kompeten. Pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi dibutuhkan untuk dapat mengelola informasi akuntansi. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun berkualitas.

Kualitas laporan pemerintah juga di pengaruhi oleh pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Karena sitem informasi keuanga pemerintah daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (PP Nomor 56 tahun 2005). Sistem akuntansi keuangan deaerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengembangan standar akuntansi pemerintahan.

Laporan Keuangan yang berkualitas juga di pengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi, di era dengan kemajuan teknologi saat ini sangat di perlukan untuk meminimalisir terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan dan mempermudah dalam mempublikasikan laporan keuangan tersebut kepada pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Kendala yang sering terjadi dalam pemanfaatan teknologi salah satunya adalah sumber daya manusia yang kurang

paham dalam mengoperasikan teknologi tersebut sehingga pemanfaatan teknologi tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan laporan keuangan yang diperlukan publik secara akurat, relevan, dan tepat waktu (Fajar, 2011).

Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan amanat undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah pemerintah daerah berkewajiban menyusun laporan keuangan secara periodik. Dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diatur dalam undang-undang nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berisikan prinsip-prinsip dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) serta disusun dengan mengacu pada kerangka konseptual pemerintahan. Laporan keuangan dapat berkualitas jika pemerintah telah menerapkan SAP dengan baik dan konsisten. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah berkualitas diukur dari opini yang di berikan oleh BPK yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) yang di berikan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerinah daerah (Suhardjo dan Adhi 2013).

Laporan keuangan yang berkualitas juga tidak lepas dari sistem pengendalian intern (SPI). Sistem pengendalian intern yaitu: "Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaata terhadap peraturan perundang-undangan". (Permendagri Nomor 60 Tahun 2008) tentang sistem pengendalian intern. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas 542 LKPD ditemukan 6.222 kelemahan SPI yang terdiri atas 2.083 permasalahan kelemahan system pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.887 permasalahan kelemahan system pengendalian pelaksanaan anggran pendapatan dan belanja dan 1.252 pemasalahan kelemahan system pengendalian intern (IHPS 1 Tahun 2017).

Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) tahun anggaran 2007 – 2018 atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pada tahun 2008 LKPD kabupaten Empat Lawang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), setahun kemudian tepatnya tahun 2009 opini BPK terhadap LKPD kabupaten Empat Lawang mengalami penurunan yang sangat drastis yakni mendapat opini tidak wajar (TW). Mulai tahun 2010 pemerintah kabupaten Empat Lawang mulai melakukan pembenahan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Pada tahun 2011 pemerintah kabupaten Empat Lawang masih mempertahankan opini sebelumnya yaitu wajardengan pengecualian (WDP). Tetapi pada tahun 2012 pemerintah kabupaten Empat Lawang mengalami penurunan yang drastis yaitu mendapat opini tidak memberikan pendapat (TMP) oleh BPK. Pada tahun 2013 – 2015 pemerintah kabupaten Empat Lawang mulai membenahi laporan keuangan mereka sehingga mengalami kenaikan yaitu mendapat opini wajar dngan pengecualian (WDP) tiga tahun berturut – turut. Pemerintah kabupaten Empat lawang pada tahun 2016 menaikan prestasi dengan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan pada tahun 2017 pemrintah kabupaten empat lawang mempertahankan prestasinya dalam mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Data hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Empat Lawang

Tahun anggaran	Opini yang diperoleh dari BPK
2008	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2009	Tidak Wajar (TW)
2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2007-2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa opini BPK terhadap LKPD kabupaten Empat Lawang mengalami peningkatan sejak tahun 2013 dan puncaknya pada tahun 2016 sampai 2017 kabupaten Empat Lawang mendapat opini WTP tentunya ini merupakan peningkatan prestasi bagi kabupaten Empat Lawang. Pada tahun 2012 pemerintah kabupaten Empat Lawang mendapat opini tidak memberikan pendapat (TMP) diakibatkan atas tujuh masalah pokok dalam penyajian laporan keuangan diantaranya kesalahan penganggaran belanja pada beberapa instansi pemerintah, pengeluaran sekretaris DPRD yang tidak memiliki bukti pertanggungjawaban, ketidakpatuhan dalam pelaksanaan anggaran belanja modal, nilai investasi permanen pada PDAM Empat Lawang yang belum tercantum pada neraca tanggal 31 Desember 2012, dan sebagainya (<http://palembang.bpk.go.id>).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa menyatakan bahwa desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes), tetapi pada kabupaten Empat Lawang penggunaan dana desa anggaran 2018 menggunakan sistem manual dan tidak memakai aplikasi sistem tata kelola keuangan desa (Siskeudes), sehingga terancam tidak menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan (BPK) karena salah satu syarat WTP adalah anggaran dana desa secara Siskeudes (Tribunnews.com 2019). Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan sistem akuntansi keuangan di kabupaten empat lawang yang menunjukkan sistem pengendalian intern yang masih kurang maksimal. Dasar bagi penulis untuk meneliti seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah kabupaten empat lawang sehingga kabupaten Empat lawang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan yang di hasilkan untuk tahun berikutnya.

Peneliti terdahulu yang telah dilakukan oleh Lilis Setyowati, dkk (2016) menyatakan bahwa peran teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan peran internal audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis menambahkan satu variabel independen yaitu pengaruh sistem pengendalian intern berdasarkan penelitian, Ni Made Sudiarianti, dkk (2015) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya pada

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan”**.

3.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

3.3 Batasan Masalah

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern, dan kualitas laporan keuangan.

3.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara simultan.

3.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bahwa :

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik 1 (satu) serta mampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada di instansi.

2. Bagi Instansi

Sebagai masukan dan gambaran dari pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah sektor publik.